

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN  
SESUDAH MONITORING PAJAK BERBASIS *ONLINE*  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA SURAKARTA  
(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**ARLINDA WIJAYANTI**

**B200150159**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

## **PERSETUJUAN**

**Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan  
Monitoring Pajak Berbasis *Online* Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta  
(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Surakarta)**

## **PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ARLINDA WIJAYANTI**

**B 200 150 159**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. M. Abdul Aris., M.Si**

**NIDN: 565/0601016401**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan  
Monitoring Pajak Berbasis *Online* Dalam Rangka Peningkatan  
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta  
(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

**ARLINDA WIJAYANTI**

**B 200 150 159**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 12 Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Dewan penguji:

1. Drs. M. Abdul Aris., M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Achyani., S.E., M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Eny Kusumawati., S.E., M.M., Ak., CA  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. H. Syamsudin, MM.**  
**NIK. 19570217**

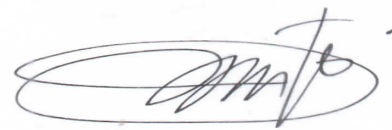
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Arlinda Wijayanti

B200 150 159

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS *ONLINE* DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA SURAKARTA  
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Surakarta)**

**Abstrak**

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak daerah Untuk itu, pemerintah daerah khususnya Kota Surakarta, berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajaknya salah satunya dengan menerapkan sistem monitoring pajak daerah berbasis *online* pada pajak daerah yang self assessment. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya monitoring pajak daerah berbasis *online* dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer, data sekunder yang meliputi data realisasi dan target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir selama periode Oktober 2016-September 2018 yang berjumlah 24 data yang diperoleh dari BPPKAD Kota Surakarta dan data primer diperoleh dari hasil wawancara di BPPKAD Kota Surakarta. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif, dan *wilcoxon signed rank test*, menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan uji *wilcoxon signed rank test* terdapat adanya perbedaan penerimaan pajak pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir sebelum dan sesudah penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online* ini yaitu secara berurutan  $0,004 < 0,05$ ,  $0,002 < 0,05$ , dan  $0,002 < 0,05$ . Implementasi dari monitoring berjalan cukup baik yaitu dibuktikan dengan potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir yang otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Sistem Monitoring *Online*, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir.

**Abstract**

Local governments are given the authority to manage their regional finances independently. One area that provides the biggest contribution in Local Revenue is local tax. For that reason, the regional government, especially the city of Surakarta, seeks to increase tax revenue, one of which is by implementing an online-based local tax monitoring system on regional self-assessment taxes. The purpose of this study was to analyze the differences in regional tax revenue before and after the implementation of online-based local tax monitoring in the context of increasing Surakarta City's Original Regional Revenue. The data in this study are secondary and primary data, secondary data including realization data and hotel tax targets, restaurant tax, and parking tax during the period October 2016-September 2018 which amounted to 24 data obtained from BPPKAD Surakarta City and primary data obtained from the results interview at BPPKAD Surakarta City. The analysis technique used to analyze data is descriptive

statistics, and willcoxon signed rank test, using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) tools. The results showed that by using the Wilcoxon signed rank test there were differences in tax revenues on hotel taxes, restaurant taxes, and parking taxes before and after the implementation of this online-based regional tax monitoring, sequentially  $0.004 < 0.05$ ,  $0.002 < 0.05$ , and  $0.002 < 0.05$ . The implementation of monitoring went quite well, as evidenced by the potential for tax leaks to be minimized which would automatically have an impact in increasing the original revenue of the city of Surakarta.

**Keywords:** Local Tax, Online Monitoring System, Local Revenue, Hotel Tax, RestaurantTax, ParkingTax.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin tinggi PAD suatu daerah maka bisa dikatakan semakin mandiri pula suatu daerah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Untuk itu, Pemerintah daerah Kota Surakarta terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu, diperbaruinya Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 dimana terdapat perubahan dan penambahan dalam peraturannya. Bentuk upaya lain yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Surakarta adalah pelaksanaan sistem monitoring pajak daerah berbasis *online*, hal ini dilakukan untuk mengikutiperkembangan teknologi internet yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari, dan hal tersebut juga mulai mencangkup dalam bidang pemerintahan, tak terkecuali dalam sektor perpajakan.

Sistem atau alat teknologi yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk memonitoring pajak daerah berbasis *online* ini adalah *Terminal Monitor Device* (TMD) dan *Cash Register*. Penerapan monitoring pajak daerah secara *online* dilakukan karena Sebelum adanya pemasangan alat *Terminal Monitor Device* (TMD) dan *Cash Register* Dikutip dari ([www.JawaPosRadarSolo.com](http://www.JawaPosRadarSolo.com)) menurut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Yosca Herman Soedrajat menyatakan bahwa cara perhitungan pajak yang masih konvensional yang

diterapkan selama ini rawan akan manipulasi karena pemerintah tidak bisa memantau atau menghitung secara pasti pendapatan dari suatu warung makan atau rumah makan.

Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran dan Pendataan BPPKAD Kota Surakarta Honggo Henri yang dikutip dari ([www.JawaPosRadarSolo.com](http://www.JawaPosRadarSolo.com)) mengatakan bahwa, sebelum pemasangan alat ini, besaran pajak tidak bisa dihitung secara tepat, karena terdapat beberapa rumah makan atau warung makan yang cukup ramai pengunjung namun belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik, yang berdampak pada saat akan membayar pajak dimana petugas pajak dan pengelola rumah makan hanya membuat perkiraan saja. Selain itu kurang maksimalnya penerimaan pajak daerah, dikarenakan database potensi pajak belum terintegrasi secara sistem atau masih manual.

Pajak daerah yang dimonitoring secara *online* ini dilakukan pada pajak daerah yang *self assessment system* atau pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak., pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, hal ini dikarenakan pajak tersebut memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi dalam pemungutan pajak daerahnya. Menurut Kepala BPPKAD Kota Surakarta Yosca Herman Soedrajat yang dikutip dari ([www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id)) kuliner di Kota Surakarta ini sangat berkembang dan memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah, terdapat ratusan warung makan atau rumah makan yang memiliki omset cukup besar tetapi belum memiliki pencatatan transaksi yang baik. (Rawadani dan Fidiana., 2018:273) mengatakan ketiga jenis pajak tersebut, potensi pendapatannya rawan akan terjadinya kecurangandalam menyampaikan atau menyetorkan besarnya pajak, hal ini dikarenakan perhitungan pajaknya menggunakan *self assesment*.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif dan kualitatif .Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Dokumentasi (DAFDA) dan Penetapan BPPKAD Kota Surakarta, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPKAD Kota Surakarta, Pegawai Bidang Kesekretariatan Kota Surakarta terkait implentasi pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis online serta hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan selama pelaksanaan monitoring pajak secara *online*, data sekunder

didapat oleh peneliti melalui teknik dokumentasi berupa jumlah realisasi dan target penerimaan pajak daerah untuk masa pajak Oktober 2016 – September 2017 yaitu sebelum pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis *online* dan masa pajak Oktober 2017 – September 2018 untuk sesudah pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis *online*.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sampai selesai. Terkait dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Analisis Deskriptif dan Uji Beda Non Parametrik Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

##### 3.1.1 Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

Tabel 1 Hasil Uji Beda *wilcoxon signed rank test*

Sebelum & Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis <i>Online</i>	Metode Pengujian	Penerimaan Pajak Daerah	
		<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Pajak Hotel	<i>Wilcoxon signed rank test</i>	0,004	Terjadi perbedaan
Pajak Restoran	<i>Wilcoxon signed rank test</i>	0,002	Terjadi perbedaan
Pajak Parkir	<i>Wilcoxon signed rank test</i>	0,002	Terjadi perbedaan

Sumber: Data Olah SPSS, 2019

Dari tabel di atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir dengan menggunakan uji beda *wilcoxon signed rank test* terjadi perbedaan, perbedaan disini dalam artian terjadi perubahan peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah Kota Surakarta selama diterapkannya monitoring pajak daerah berbasis *online*, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas atau *sig(2-tailed)* untuk pajak hotel sebesar  $0,004 < 0,05$ , untuk pajak restoran  $0,002 < 0,05$ , dan terakhir untuk pajak parkir nilai probabilitasnya  $0,002 < 0,05$ , yang artinya apabila nilai probabilitas atau nilai *sig (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka terjadi perbedaan yang signifikan.



### 3.1.2 Analisis Deskriptif

Uji ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum dari data yang diteliti. Adanya perbedaan juga dapat dilihat pada tabel 3 pada analisis deskriptif yang menunjukkan jumlah rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah per bulannya pada sebelum penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online* yaitu periode Oktober 2016 – September 2017 dan sesudah penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online* untuk periode Oktober 2017 – September 2018. Pada pajak hotel terjadi peningkatan yaitu yang semula Rp 2.250.268.481,83 meningkat menjadi Rp 2.630.262.379,67 atau sebesar 16,89%. Pajak restoran terjadi peningkatan yang sebelumnya sebesar Rp 2.949.424.509,83 mengalami peningkatan setelah adanya monitoring secara *online* yaitu sebesar Rp 3.550.493.778,33 atau meningkat sebesar 20,38%. Terakhir untuk pajak parkir juga mengalami peningkatan yaitu yang sebelum penerapan monitoring secara *online* sebesar Rp 364.221.350,42 meningkat menjadi Rp 470.058.155,83 atau meningkat sebesar 29,06%. Terjadinya perbedaan penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta khususnya untuk Pajak Hotel, Restoran, dan juga Parkir dengan diterapkannya sistem monitoring secara *online* ini didukung juga pernyataannya dari Bapak Widiyanto selaku kepala bidang penagihan dan keberatan.

*“Untuk penerimaan pajaknya cukup ada peningkatan, banyak yang meningkat dibandingkan dengan yang manual dulu....”*(wawancara, 21 Oktober 2019).

Tabel 2 Deskriptif Statistik Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Secara *Online*

		<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
<b>Pajak Hotel</b>	<b>Sebelum Penerapan Monitoring <i>Online</i></b>	12	1.467.195.778	2.662.499.092	2.250.268.481,83	331.653.266,312
	<b>Sesudah Penerapan Monitoring <i>Online</i></b>	12	1.819.388.713	3.532.655.422	2.630.262.379,67	477.327.589,977
	<b>Valid (listwise)</b>	12				
<b>Pajak Restoran</b>	<b>Sebelum Penerapan Monitoring <i>Online</i></b>	12	2.405.437.886	3.337.503.779	2.949.424.509,83	255.590.908,821
	<b>Sesudah Penerapan Monitoring <i>Online</i></b>	12	2.927.819.049	4.398.928.310	3.550.493.778,33	416.751.029,953
	<b>Valid (listwise)</b>	12				
<b>Pajak Parkir</b>	<b>Sebelum Penerapan Monitoring <i>Online</i></b>	12	307.869.380	438.924.945	364.221.350,42	35.589.584,221
	<b>Sesudah Penerapan Monitoring <i>Online</i></b>	12	363.614.332	651.396.950	470.058.155,83	97.387.218,701
	<b>Valid (listwise)</b>	12				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Parkir Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis *Online* Terhadap PAD

Hasil uji beda dengan *wilcoxon signed rank test* untuk pajak hotel sebesar  $0,004 < 0,05$ , untuk pajak restoran sebesar  $0,002 < 0,05$ , dan pajak parkir  $0,002 < 0,05$ , sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online*. Adanya perbedaan ini dapat dilihat pada data dimana terdapat peningkatan penerimaan pajak untuk tiap periodenya, untuk rata-rata penerimaan pajak hotel per bulan yang meningkat sebesar Rp 379.993.898 atau sebesar 16,89% rata-rata penerimaan per bulan pada pajak restoran meningkat sebesar Rp 601.069.269 atau sebesar 20,38%, dan terakhir untuk pajak parkir meningkat sebesar Rp 105.836.805 atau sebesar 29,06% .Adanya peningkatan ini diakibatkan atau dipicu karena Wajib Pajak dimonitoring atau dipantau dalam setiap transaksinya sehingga Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam membayarkan kewajibannya, dan juga adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh pegawai BPPKAD kepada Wajib Pajak untuk lebih mendekatkan tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, selain itu untuk mengapresiasi Wajib Pajak yang sudah patuh atau taat dalam membayarkan pajaknya maka Wajib Pajak memberikan sebuah reward untuk mengapresiasi Wajib Pajak yang taat tersebut, hal ini dapat memicu Wajib pajak lain agar tertarik untuk membayar pajaknya.

### 3.2.2 Implementasi Monitoring Pajak Berbasis *Online* pada Pajak Daerah di Kota Surakarta.

Pelaksanaan monitoring ini mulai berlaku pada 19 September 2017, untuk tata cara penggunaan sudah mulai dijalankan sejak Oktober 2018 dan efektif dalam penerapannya pada tahun 2018. Perwali nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan sistem secara *online* dibuat dengan menimbang Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang pajak daerah.

Pelaksanaan monitoring Pajak Daerah ini memberikan beberapa dampak positif dimana mengurangi adanya kebocoran pajak dan dapat terpungutnya pajak secara optimal, kemudian juga berkaitan dengan pelayanan, yaitu memberikan kemudahan

pelayanan dan memberikan transparansi kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wulan Tendra, selaku Kepala DAFDA dan Penetapan BPPKAD Kota Surakarta,

*“Tujuannya terkait dengan pelayanan, jadi kalau selama ini kita belum istilahnya belum pakai online itu kan mungkin masih manual, itu kan untuk waktunya juga mungkin agak lama, terus terkait transparansi nya juga masih belum ini nggih, nah dengan adanya ini kan pelayanan bisa cepat, terus untuk transparansinya kepada Wajib Pajak itu, Wajib Pajak juga semua biasmengakses.”*(wawancara, 21 Oktober 2019).

Penggunaan dari alat *Terminal Monitor Device* (TMD) tersebut pada dasarnya konsepnya adalah ambil-kirim-simpan, data transaksi pada Wajib Pajak akan diambil dari *data base* oleh pihak berwenang, lalu dikirimkan melalui alat perekam yang dipasang ke *server* yang dimiliki oleh BPPKAD, kemudian setelah data diterima oleh BPPKAD data tersebut akan disimpan untuk kemudian dijadikan dasar atau patokan perhitungan besarnya pajak hotel, restoran dan parkir.

Untuk *cash register*, alat ini digunakan pada restoran yang mana dalam melakukan perhitungan pembayarannya masih menggunakan kalkulator atau masih manual, alat ini disediakan oleh BPPKAD berupa mesin kasir, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wulan Tendra selaku kepala bidang DAFDA Kota Surakarta.

*“....kalau Cash Register itu langsung gak perlu data base karena kita yang nyediain, bentuknya itu seperti mesin kasir gitu....”* (wawancara 21 Oktober 2019)

Alat monitoring secara *online* ini pada dasarnya tidak dijadikan patokan dalam pembayaran Pajak Daerah ini, hanya dijadikan sebagai sarana untuk pemeriksaan. Apabila terdapat Wajib Pajak yang membayarkan utang pajaknya kepada Pemerintah Daerah, maka pada saat masa pajak tersebut petugas pajak akan melakukan pemeriksaan atau *cross check* dengan alat yang sudah terpasang pada usaha Wajib Pajak tersebut, jika memang terdapat selisih yang cukup banyak maka petugas pajak akan mengklarifikasi dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Widiyanto selaku kepala bidang penagihan dan keberatan Kota Surakarta.

*“....Wajib Pajak bebas untuk melaksanakan pembayaran berapapun yang meraka laporkan, tapi nanti kita ada suatu alat TMD itu untuk kita cross checkkan apakah ada*

*data yang dibayarkan Wajib Pajak tadi sudah sesuai dengan TMD, nanti kita kalau memang pajaknya belum sesuai, alat itu sebagai sarana untuk pemeriksaan untuk kita cross check apakah antara pajak yang dia bayar kemudian dengan transaksi TMD tadi berapa, nanti kalau misal ada selisih berapa nanti kita lakukan pemeriksaan kita adakan klarifikasi itu nanti bisa outputnya bisa kurang bayar pajak nggih, jadi pajak yang dia bayarkan tadi belum sesuai dengan TMD yang sesungguhnya, jadi ada outputnya kurang bayar pajak SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,....” (wawancara, 22 Oktober 2019).*

Adanya implementasi monitoring Pajak Daerah secara *online* ini memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dimana Wajib Pajak diberi kebebasan dari melegalisasi nota / bill, dapat mengurangi beban waktu, tenaga dan biaya operasional dalam pengadaan bon / bill, Selain memberi kemudahan kepada Wajib Pajak, hal ini juga memberikan manfaat juga kepada Petugas Pajak, dimana dapat mengurangi beban waktu dan jumlah petugas lapangan, dimana petugas sudah tidak diperkenankan untuk menerima pembayaran pajak, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widiyanto selaku Kepala bidang penagihan dan keberatan,

*“....untuk petugas sudah tidak diperkenankan untuk menerima pembayaran pajak, jadi tidak ada yang namanya jemput bola itu udah nggak ada.” (wawancara, 22 Oktober 2019).*

### 3.2.3 Analisis Penerapan Monitoring Pajak Daerah Secara *Online* di Kota Surakarta telah Efektif Sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2018.

Pelaksanaan monitoring Pajak Daerah secara *online* pada pajak hotel, restoran dan parkir mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dimana untuk pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 16,89%, untuk pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 20,38%, dan parkir mengalami kenaikan sebesar 29,06%. Dalam pelaksanaan monitoring pajak daerah secara *online* ini tentunya ditunjang pula dengan kesiapan para petugas pajak yang melaksanakan tugas monitoring tersebut. terdapat beberapa petugas pajak yang memang bertugas untuk handle bagaimana pelaksanaan aplikasi *online*, kaitannya dengan data base, dan kaitannya koordinasi dengan bank.

Dengan berbagai kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kota Surakarta dan juga ditunjangnya kesiapan dari petugas BPPKAD dalam

melaksanakan monitoring pajak secara *online* dan kemauan dari Wajib Pajak baik itu hotel, restoran dan juga parkir untuk bisa menerima adanya peraturan tersebut maka akan membuat tercapainya tujuan dan efektif untuk dijalankan sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2018 serta pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis *online* ini juga dapat dilaksanakan dengan baik.

#### 3.2.4 Analisis Hambatan Pada Sistem *Online* Dalam Pelaksanaan Monitoring Pajak

Daerah Secara *Online* Di Kota Surakarta dan Cara Menanggulangnya.

Hambatan yang dialami selama adanya pelaksanaan monitoring pajak daerah secara *online* ini dari segi Wajib Pajaknya dimana mereka keberatan, merasa diawasi terus, merasa tidak dipercaya, serta masih kurangnya pengetahuan akan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan suatu daerah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wulan Tendra selaku kepala bidang DAFDA Kota Surakarta.

*“Kendalanya ya itu tadi masih belum masih susah untuk diberi pemahaman bahwa ini juga keuntungan kamu juga dipasang seperti ini, wong mereka juga sebenarnya gak rugi lo, kita jajan yang dibebani juga kita ya bukan uang mereka yang dipotong untuk pajak ya bener kan, itu ya kendalanya dari Wajib Pajak....”* (wawancara, 21 Oktober 2019).

Wajib Pajak yang memang masih kurang paham mengenai teknologi mereka merasa kesulitan dengan alat yang diberikan kepada Wajib Pajak, lebih mudah dengan menggunakan cara konvensional atau dengan cara manual, Terdapat pula Wajib Pajak yang memang sengaja untuk mematikan alat monitoring. Selain dari segi Wajib Pajaknya juga terdapat hambatan dari segi alat monitoringnya, bagaimanapun juga alat yang digunakan merupakan buatan manusia yang memang terdapat beberapa masalah, akan tetapi alat monitoring ini terus dilakukan *update* atau pemabaharuan supaya lebih baik lagi alat yang digunakan tersebut,

Upaya yang dilakukan untuk permasalahan terkait dengan Wajib Pajak yaitu terus diadakan sosialisasi terkait dengan pentingnya pajak, sosialisasi tersebut bisa dilakukan di hotel, kantor kecamatan, serta melalui pesan-pesan di setiap sudut kota dengan pemasangan spanduk, penggunaan vidiotron yang menampilkan video berkaitan dengan taat membayar pajak, selain itu untuk menambah minat Wajib Pajak Daerah untuk patuh dalam membayar Pajak Daerahnya, Pemerintah Kota Surakarta memberikan

apresiasi dengan memberikan *reward* atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah yang patuh dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, dengan hadiah – hadiah yang menarik seperti mobil, Televisi, lemari pendingin, lalu ada sepeda motor juga, diharapkan akan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Daerah untuk melaksanakan kewajibannya.

Upaya lain yang dilakukan untuk permasalahan terkait dengan alat monitoringnya, apabila memang terjadi kesalahan pada alatnya Wajib Pajak bisa menghubungi pihak BPPKAD agar pihak BPPKAD bisa langsung merespon terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Wajib Pajak dan mendiskusikannya dengan pihak ketiga yaitu finet dan kominfo terkait kerusakan yang dialami.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

- 1) Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan juga Pajak Parkir di Kota Surakarta sendiri setelah adanya alat monitoring pajak daerah secara *online* ini mengalami peningkatan jumlah penerimaan pajak daerahnya, hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *wilcoxon signed rank test* (nilai asymp sig < nilai  $\alpha$ ) masing – masing nilai asymp sig  $0,004 < 0,05$ ;  $0,002 < 0,05$ ;  $0,002 < 0,05$ .
- 2) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 pasal 57 dan 58 terkait dengan Monitoring Pajak Daerah secara *online* ini yang mulai diberlakukan pada Tahun 2018, berjalan dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2, Dengan adanya monitoring ini dapat mengurangi adanya kebocoran pajak dan pajak dapat dipungut secara optimal, diberikan kemudahan dimana Wajib Pajak dibebaskan dari kewajiban melegalisasi nota / bill, yang mana dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya operasional terkait pengadaan bon / bill, memberikan kemudahan kepada petugas pajak dimana petugas tidak perlu lagi melakukan jemput bola jadi dapat menghemat waktu dan jumlah petugas lapangan.
- 3) Hambatan yang terjadi selama penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online* ini :

- a. Dari segi Wajib Pajak:
    - 1). Kurang pahamnya Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak daerah,
    - 2). Adanya kesulitan dalam penggunaan alat monitoringnya atau masih gagap teknologi jadi belum bisa mengikuti perkembangan zaman,
    - 3). Wajib Pajak merasa diawasi dalam setiap transaksinya, merasa tidak dipercaya, dan
    - 4). Wajib Pajak sengaja mematikan alat monitoring tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar pajak dengan jumlah yang besar.
  - b. Dari segi alat monitoringnya juga karena semua adalah buatan manusia pasti memiliki permasalahan, dimana sistem mengalami error.
- 4) Upaya yang dilakukan selama penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online* ini:
- a. Melakukan sosialisasi terus menerus kepada Wajib Pajak baik itu di Hotel, di Kecamatan, yang mana bisa menghadirkan Walikota atau Kepala Badan serta menyosialisasikan di beberapa surat kabar,
  - b. Memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang taat akan pembayaran pajaknya dengan memberikan hadiah berupa mobil, sepeda motor, televisi, kulkas, agar Wajib Pajak lain juga tertarik dengan tertib membayar pajak.
  - c. Terkait alat monitoringnya apabila terdapat kerusakan pada alatnya bisa menghubungi pihak BPPKAD agar bisa ditindak lanjuti dengan pihak ketiga supaya bisa dicarikan solusi terkait permasalahan yang terjadi.
  - d. Melakukan pembaharuan atau melakukan *update* pada alatnya agar bisa lebih baik lagi sehingga Wajib Pajak tidak bisa berbuat curang.
- 5) Terkait dengan pelaksanaannya di Kota Surakarta sendiri, penerapan monitoring ini sudah baik atau efektif untuk dijalankan di Kota Surakarta sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2018 pasal 57 dan 58, dimana



realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dimana untuk pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 16,89%, pajak restoran sebesar 20,38% dan terakhir pajak parkir mengalami kenaikan sebesar 29,06%. Serta ditunjang dengan kesiapan para petugas pajak yang selalu melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak, mendatangi Wajib Pajak untuk memastikan bahwa alat untuk memonitoring masih berfungsi dengan baik, kemudian pembagian tugas yang sudah baik pula, ada yang bertugas mendhandle pelaksanaan sistem *onlinenya*, menghandle terkait data base, dan terkait koordinasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi, Ichwan, Imam Suyadi dan Sri Sulasmiyati. 2016. “Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat”. *Jurnal Perpajakan*. Vol 11 No 1 2016. Hal 1-9.
- Arkea, Siti Nurlaela, dan R Dewi. “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar”. *Jurnal Ekonomi Paradigma*. Vol 19 No. 2 02 Agustus 2017 – Januari 2018. Hal 61-67.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Leliya dan Fifi Afiyah. 2016. “Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon”. *Jurnal Al-Mustashfa*. Vol. 4 No 2, 2016. Hal 158-177.
- Mea, Frangky Martinus, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah. 2017. “Anlisis Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Aset Daerah Di Kabupaten Minahasa”. *Agri-Sosio ekonomi Unsrat*. Vol.13 No. 12A Juli 2017. Hal 232-334.
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2016. *Inti Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Surakarta: Muhammadiyah Surakarta Press.
- Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sekretariat Daerah. Surakarta.
- Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Sekretariat Daerah. Surakarta.
- Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Surakarta.

- Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Secara *Online* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah. Surakarta.
- Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel.Sekretariat Kota Surakarta. Surakarta.
- Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoma Pelaksanaan Pajak Restoran.Sekretariat Kota Surakarta. Surakarta.
- Peraturan Walikota. Peraturan Kota Surakarta Nomor 15A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Parkir.Sekretariat Kota Surakarta. Surakarta.
- Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Surakarta.
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio, Srikandi Kumadji, dan Agung Darono. “Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)” *Jurnal Perpajakan*. Vol 3 No. 1 Desember 2018. Hal 1-8.
- Rawadani, Aji Rifqi dan Fidiana.2018 .“Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak *Online*”*Jurnal Ekonomi*. Vol. XXIII No. 03 November 2018. Hal 272-289.
- Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suardani, Ni luh Putu Riska, Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Sukma Kurniawan.2017 .“Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng”*E-jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*.Vol. 8 No 2, 2017.
- Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, Gendro. 2011. “ *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*”. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.